



**LAPORAN KEUANGAN WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
(GABUNGAN)
PROVINSI DKI JAKARTA**



Per 31 Desember 2022

Audited

KANTOR PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

JL. TANAH ABANG I NO. 1

JAKARTA PUSAT

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi Unit Perangkat Daerah (UPD) di bawahnya yaitu Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat Gabungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan dan Kelurahan se Jakarta Pusat terdiri dari 8 Kecamatan dan 44 Kelurahan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2014. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, terdapat pengakuan realisasi Belanja Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp. 732.376.950.477,00 atau sebesar 95,65% dari yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 765.673.947.156,00
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2022. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah Rp. 794.805.575.731,00 dan Kewajiban sebesar Rp. 16.817.749.873,00 sehingga Ekuitas (Kekayaan Bersih) Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 777.987.825.858,00 sedangkan Ekuitas LO sebesar Rp. 46.039.760.741,00 dan RK PPKD adalah sebesar Rp. 731.948.065.117,00
3. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi penurunan ekuitas Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah ekuitas akhir sebesar Rp. 777.987.825.858,00
4. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan sebesar Rp. (732.275.356.257,00)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna Laporan Keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos - pos Laporan Keuangan,

daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari pengguna Laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 31 Desember 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat



Dhany Sukma

NIP 197403091993111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN		
NERACA		
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		
LAPORAN OPERASIONAL		
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	1
1.2	LANDASAN HUKUM	1
1.3	SISTEMATIK PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	3
BAB II	EKOMONI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN	
	TARGET KINERJA	4
2.1	EKONOMI MAKRO	4
2.2	KEBIJAKAN KEUANGAN	4
2.3	INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	4
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	6
3.1	IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	6
3.2	HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN	6
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI	7
4.1	ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	7
4.2	BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	7
4.3	BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	17
4.4	PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	19

BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	20
5.1	RINCIAN DAN PENJELESAAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN	20
5.2	PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS, UNTUL ENTITAS AKUNTANSI/ PELAPORAN YANG MENGGUNAKAN BASIS AKRUAL	27
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	29
6.1	DOMISILI	29
6.2	TUGAS POKOK	29
6.3	STRUKTUR ORGANISASI	31
BAB VII	PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1	REALISASI BELANJA	6
TABEL 5.1	REALISASI BELANJA	20
TABEL 5.2	DAFTAR ASET TETAP	22



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT(GABUNGAN)

PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	(%)	REALISASI Tahun 2021
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	243.600.157.082,00	235.497.558.531,00	96,67	248.864.210.173,00
Belanja Barang dan Jasa	489.483.156.146,00	472.458.913.718,00	96,52	413.325.252.183,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	733.083.313.228,00	707.956.472.249,00	96,57	662.189.462.356,00
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.011.679.985,00	2.708.366.217,00	89,93	42.879.540,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.578.953.943,00	21.712.112.011,00	73,40	6.655.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	8.618.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	32.590.633.928,00	24.420.478.228,00	74,93	58.152.540,00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT(GABUNGAN)


PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	(%)	REALISASI Tahun 2021
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	765.673.947.156,00	732.376.950.477,00	95,65	662.247.614.896,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(765.673.947.156,00)	(732.376.950.477,00)		(662.247.614.896,00)
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyerahan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00		0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	(765.673.947.156,00)	(732.376.950.477,00)		(662.247.614.896,00)

Jakarta, 13 Juni 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT


Dhany Sukma, S.Sos., MAP

NIP. 197403091993111001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT(GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor	0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Sisa UP	0,00	0,00
Kas Tunai	0,00	0,00
Kas di Bank	0,00	0,00
Uang Panjar	0,00	0,00
Sisa LS	0,00	0,00
Sisa TU	0,00	0,00
Kas Tunai	0,00	0,00
Kas di Bank	0,00	0,00
Uang Panjar	0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Kas Dana BOP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	128.409.276,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT(GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	128.409.276,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Uang Muka	0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD	0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	1.095.952.602,00	900.116.458,00
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka	1.095.952.602,00	900.116.458,00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	5.804.567.266,00	5.436.429.190,00
Barang Pakai Habis	5.804.567.266,00	5.436.429.190,00
Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	7.028.929.144,00	6.336.545.648,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	531.554.609.959,00	533.989.914.639,00
Peralatan dan Mesin	126.064.431.921,00	124.722.825.727,00
Gedung dan Bangunan	559.470.265.412,00	540.828.552.368,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	673.931.525,00	731.054.525,00
Aset Tetap Lainnya	622.712.239,00	663.368.239,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(434.879.845.122,00)	(412.171.681.652,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(115.596.833.278,00)	(108.487.698.586,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(318.597.191.610,00)	(302.986.277.359,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(489.558.234,00)	(501.443.707,00)



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT(GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(196.262.000,00)	(196.262.000,00)
JUMLAH ASET TETAP	783.506.105.934,00	788.764.033.846,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan	0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	26.883.944.422,00	27.166.582.534,00
Aset Rusak Berat/Usang	26.170.721.594,00	26.453.359.706,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi	0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum	0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD	0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya	0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari	0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental	0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan	0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	713.222.828,00	713.222.828,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya	0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan	0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(22.613.403.769,00)	(23.109.962.981,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(21.900.180.941,00)	(22.396.740.153,00)



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT(GABUNGAN)**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(713.222.828,00)	(713.222.828,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	4.270.540.653,00	4.056.619.553,00
PROPERTI INVESTASI		
Properti Investasi - Tanah	0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
JUMLAH ASET	794.805.575.731,00	799.157.199.047,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Taspen	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian	0,00	0,00
Utang PPh Pusat	0,00	0,00
Utang PPh 21	0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 22	0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 23	0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 25	0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 26	0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)	0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 15	0,00	0,00
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPN Pusat	0,00	0,00
Utang PPN Pusat	0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT(GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Utang PPN di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD	0,00	0,00
Utang Taperum	0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Utang Jaminan	0,00	0,00
Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame	0,00	0,00
Utang Jaminan Penawaran	0,00	0,00
Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00
Utang Jaminan KTP Musiman	0,00	0,00
Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas	0,00	0,00
Utang Jaminan Sanggah Banding	0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah	0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat	0,00	0,00
Utang Bunga BLUD	0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT(GABUNGAN)NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Bangun Guna Serah		
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD	0,00	0,00
Utang Belanja	16.817.749.873,00	19.403.559.273,00
Utang Belanja Pegawai	14.948.265.058,00	18.288.641.014,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	1.346.392.468,00	1.114.918.259,00
Utang Belanja Barang	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa	1.284.133.701,00	1.114.918.259,00
Utang Belanja Pemeliharaan	62.258.767,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00
Utang Belanja Bunga	0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi	0,00	0,00
Utang Belanja Hibah	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	523.092.347,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Utang Belanja BLUD	0,00	0,00
Utang Belanja bantuan Sosial	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00
Utang Transfer	0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT(GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Utang Kompensasi Pajak	0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	0,00	0,00
Utang Jaminan	0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah	0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	16.817.749.873,00	19.403.559.273,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	16.817.749.873,00	19.403.559.273,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	46.039.760.741,00	779.753.639.774,00
Ekuitas SAL	0,00	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	731.948.065.117,00	0,00
RK PPKD Kas	732.376.950.477,00	0,00
RK PPKD Non Kas	(428.885.360,00)	0,00
JUMLAH EKUITAS	777.987.825.858,00	779.753.639.774,00
JUMLAH EKUITAS	777.987.825.858,00	779.753.639.774,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	794.805.575.731,00	799.157.199.047,00

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DKI JAKARTA

Dhany Sukma, S.Sos., MAP
NIP. 197403091993111001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2021 dan 2020		111.407.033.578,00	203.450.286.710,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		668.346.606.196,00	594.629.746.503,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2022		779.753.639.774,00	798.080.033.213,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2021 dan 2020		668.346.606.196,00	594.629.746.503,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(668.346.606.196,00)	(594.629.746.503,00)
RK PPKD per 1 Januari 2022		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		779.753.639.774,00	798.080.033.213,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(732.275.356.257,00)	(673.067.414.200,00)
Mutasi RK PPKD		731.948.065.117,00	668.346.606.196,00
Koreksi Ekuitas		(1.438.522.776,00)	(13.605.585.435,00)
Jumlah Perubahan Ekuitas		(1.765.813.916,00)	(18.326.393.439,00)
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		46.039.760.741,00	111.407.033.578,00
RK PPKD		731.948.065.117,00	668.346.606.196,00
EKUITAS AKHIR		777.987.825.858,00	779.753.639.774,00

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
 JAKARTA PUSAT
 PROVINSI DKI JAKARTA

Dhany Sukma, S.Sos., MAP

NIP. 197403091993111001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50110000 - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4=2-3	5=4:3
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	1.299.390.000,00	(1.299.390.000,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah-LO	0,00	1.299.390.000,00	(1.299.390.000,00)	(100,00)
Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	1.299.390.000,00	(1.299.390.000,00)	0,00
BEBAN				
BEBAN OPERASI	704.031.043.869,00	645.534.146.877,00	58.496.896.992,00	9,06
Beban Pegawai	233.011.715.902,00	227.095.583.005,00	5.916.132.897,00	2,61
Beban Barang dan Jasa	471.019.327.967,00	418.438.563.872,00	52.580.764.095,00	12,57
Beban Barang	46.566.906.168,00	22.458.837.106,00	24.108.069.062,00	107,34
Beban Jasa	408.775.839.535,00	385.443.825.085,00	23.332.014.450,00	6,05
Beban Pemeliharaan	15.621.360.874,00	10.410.183.574,00	5.211.177.300,00	50,06
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	55.221.390,00	125.718.107,00	(70.496.717,00)	(56,08)
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	28.244.312.388,00	28.832.657.323,00	(588.344.935,00)	(2,04)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.256.740.120,00	9.977.187.214,00	(1.720.447.094,00)	(17,24)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.973.673.092,00	18.838.714.783,00	1.134.958.309,00	6,02
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	13.899.176,00	16.755.326,00	(2.856.150,00)	(17,05)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	732.275.356.257,00	674.366.804.200,00	57.908.552.057,00	92,09
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL	(732.275.356.257,00)	(673.067.414.200,00)	(59.207.942.057,00)	8,80
NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50110000 - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

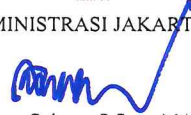
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4=2-3	5=4:3
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA				
BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO	(732.275.356.257,00)	(673.067.414.200,00)	(59.207.942.057,00)	8,80

Jakarta, 13 Juni 2023

Walikota

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT


Dhany Sukma, S.Sos., MAP

NIP. 197403091993111001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna (masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah daerah) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik

- Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
 14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akruar;
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019;
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Operasional dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan keuangan.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- Menyajikan informasi tentang pencapaian target, peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- Mengungkapkan informasi untuk pos-pos LRA, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
- Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta berfokus pada ekonomi makro yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berorientasi kepada pelayanan publik menuju kota jasa modern yang berbudaya, termasuk peningkatan koordinasi dan pengendalian ekonomi kota serta pengelolaan keuangan, aset, serta ketatausahaan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) tidak memiliki Pendapatan (Retribusi) Daerah, namun hanya belanja langsung dan tidak langsung dalam membiayai kegiatan operasional dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta Pusat

- **Visi**

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berorientasi kepada pelayanan publik menuju kota jasa modern yang berbudaya”

- **Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 7 (tujuh) pernyataan misi sesuai dengan peran dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Adapun rumusan Misi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan publik Kota Administrasi;

2. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian untuk mewujudkan kota jasa yang modern;
3. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian dalam mewujudkan kota yang berbudaya;
4. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan wilayah kerja Kota Administrasi, kompetensi aparatur dan kesadaran hukum aparatur;
5. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik serta pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup;
6. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
7. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian ekonomi kota serta melakukan pengelolaan keuangan, aset, serta ketatausahaan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat. Karena itu, ada 7 (tujuh) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Ketujuh butir pernyataan Misi tersebut menggambarkan dan menjelaskan peran dan usaha yang akan dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam rangka mewujudkan Visi terkait dengan upaya organisasi untuk Meningkatkan penerapan manajemen yang berbasis kompetensi, kaidah dan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat. Kandungan pengertian dalam pernyataan misi pertama ini adalah penekanan pada basis manajemen, yaitu kompetensi dan penerapan Good Governance. Selain itu, misi ini juga mencakup upaya dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat, dalam hal ini melalui penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Tabel 3.1 Realisasi Belanja per 31 Desember 2022

URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Operasi	733.083.313.228,00	707.956.472.249,00
Belanja Pegawai	243.600.157.082,00	235.497.558.531,00
Belanja Barang dan Jasa	489.483.156.146,00	472.458.913.718,00
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	32.590.633.928,00	24.420.478.228,00
Belanja Tanah	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	3.011.679.985,00	2.708.366.217,00
Belanja Gedung dan Bangunan	29.578.953.943,00	21.712.112.011,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-
Belanja Tidak Terduga	-	-
Belanja Tidak Terduga	-	-

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam pencapaian target realisasi per 31 Desember 2022 Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Provinsi DKI Jakarta secara umum tidak mengalami hambatan dan kendala yang signifikan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintah daerah yang ditunjuk/diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Entitas akuntansi mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tugas pokok, fungsi setiap unit/satuan kerja pada pemerintah daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pada pemerintahan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan beban maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

4.2.1 Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi sebagai Perangkat Daerah (PD) periode 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022, yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Neraca
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

a. Penjelasan Umum LRA

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan

lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara lain angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

- Pendapatan
- Belanja
- Transfer
- Surplus atau defisit
- Penerimaan pembiayaan
- Pengeluaran pembiayaan
- Pembiayaan neto; dan
- Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (SILPA / SIKPA)

Pos, judul dan sub jumlah aslinya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh pernyataan standar Akuntansi Pemerintah ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan sesuatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan peralatan dan aset tak berwujud.

Belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak di harapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah pusat/daerah.

b. Penjelasan Umum Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar).

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Sedangkan informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah dalam neraca didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Struktur Neraca Pemerintah Pusat memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan struktur Neraca Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Perbedaan tersebut diakibatkan karena kepemilikan aset negara berbeda dengan kepemilikan aset di daerah. Aset negara lebih kompleks dibandingkan dengan aset daerah. Salah satu contohnya adalah kas. Kas di Pemerintah Pusat termasuk kas yang ada di Bank Indonesia.

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa neraca menggambarkan Penyusunan dan penyajian Aset dan kewajiban. Dalam neraca kadang-kadang memiliki dasar pengukuran yang berbeda, tergantung dari sifat dan fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dapat dicatat atas dasar biaya perolehan, sedangkan kelompok lainnya dapat dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan. Secara garis tentang jenis-jenis aset, kewajiban dan ekuitas serta pengakuan dan pengukurannya pada neraca dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam neraca aset terbagi atas 2, yaitu:

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3

(tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

b. Aset Nonlancar

Aset nonlancar merupakan aset pemerintah yang penggunaannya diharapkan melebihi satu periode pelaporan (1 tahun), terdiri dari aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, serta aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah maupun yang digunakan oleh masyarakat umum. Untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca, aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang berupa investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, seperti: Investasi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Sedangkan investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti: Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN/BUMD, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari: a) Tanah; b) Peralatan dan mesin; c) Gedung dan bangunan; d) Jalan, irigasi, dan jaringan; e) Aset tetap lainnya; dan f) Konstruksi dalam pengerjaan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Pengakuan aset dilakukan apabila ada potensi manfaat ekonomi di masa depan yang akan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau dapat diakui juga pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah ke tangan Pemerintah. Sedangkan untuk pengukuran atau pencatatan suatu aset tergantung dari jenis asetnya, diantaranya adalah dengan cara sebagai berikut:

Kas dicatat sebesar nilai nominal;

Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;

Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

Persediaan dicatat sebesar:

- Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola (membangun sendiri) meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga

listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Sedangkan untuk aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Kewajiban

Kewajiban pemerintah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah terbagi 2 jenis, yaitu:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu diatas 12 (dua belas) bulan. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

Kewajiban tersebut bermaksud didanai kembali (refinancing) sebagai kewajiban jangka panjang oleh pemberi pinjaman dan didukung dengan adanya suatu perjanjian atau penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Pengakuan Kewajiban dilakukan pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul, dengan nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan

andal. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dalam rupiah, sementara kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Berkaitan dengan jenis-jenis aset, kewajiban dan ekuitas diatas, suatu entitas dapat menentukan subklasifikasi pos-pos yang disajikan dalam neraca. Pengklasifikasian dilakukan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan.

c. Penjelasan Umum LO

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan.

Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi ekonomi, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Namun jika laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke setiap fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

Dalam memilih penggunaan kedua metode klasifikasi beban tersebut tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka SAP memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak pada entitas tersebut.

Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi juga harus mengungkapkan tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Sama halnya dengan LRA, struktur Laporan Operasional Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki perbedaan. Perbedaan struktur tersebut juga diakibatkan karena perbedaan sumber pendapatan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, yang membedakan antara LRA dengan LO diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan pada LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan pengelompokan pada LO terdiri dari pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.
2. LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual.
3. Akibat dari perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Pada LRA, pembelian aset tetap dikategorikan sebagai belanja modal atau pengurang pendapatan, sedangkan pada LO, pembelian aset tetap tidak diakui sebagai pengurang pendapatan.

d. Penjelasan Umum Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekarang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4.2.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

1. Menyajikan informasi tentang pencapaian target, peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

3. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
4. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis akrual;
5. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- **Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah. Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum disetor ke rekening kas umum daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

- **Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- **Kas**

Kas di Bendahara pengeluaran adalah uang yang dikuasai Bendahara Pengeluaran, yang berupa kas di brankas dan kas di rekening Bank. Kas dinilai dengan nilai nominal.

- **Persediaan**

Persediaan adalah barang- barang yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau diserahkan/ dijual kepada masyarakat dalam waktu satu tahun. Persediaan dibukukan berdasarkan stock opname yang dilakukan tiap akhir tahun.

- **Aset Tetap**

Tanah

Tanah yang dibeli sampai dengan tahun 2007 dinilai dengan nilai wajar yaitu Nilai jual objek pajak (NJOP) PBB tahun 2007 dan jika tanah dibeli setelah tahun 2007 dinilai dengan nilai wajar yaitu harga perolehannya.

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin selain alat- alat angkut (kendaraan) dinilai dengan harga perolehan, atau jika tidak ditemukan harga perolehannya, maka dilakukan berdasarkan taksiran dengan membandingkan dengan data harga barang yang sejenis. Alat-alat angkut (kendaraan) yang pembeliannya sampai dengan tahun 2007 dinilai dengan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 51 tahun 2007, sedangkan alat- alat angkut (kendaraan) yang diperoleh setelah tahun 2007 dinilai dengan harga perolehan.

Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dibeli/ diperoleh sampai dengan tahun 2007 dengan nilai wajar yaitu harga berdasarkan Daftar Jual Permeter yang dikeluarkan oleh Asosiasi Masyarakat Penilai Indonesia, jika diperoleh setelah tahun 2007 dinilai dengan nilai wajar yaitu harga perolehannya.

- **Aset Lainnya**

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset yang berupa hasil penelitian, Kajian dan hasil intelektual lainnya yang tidak termasuk dalam aset tetap.

Aset Rusak Berat

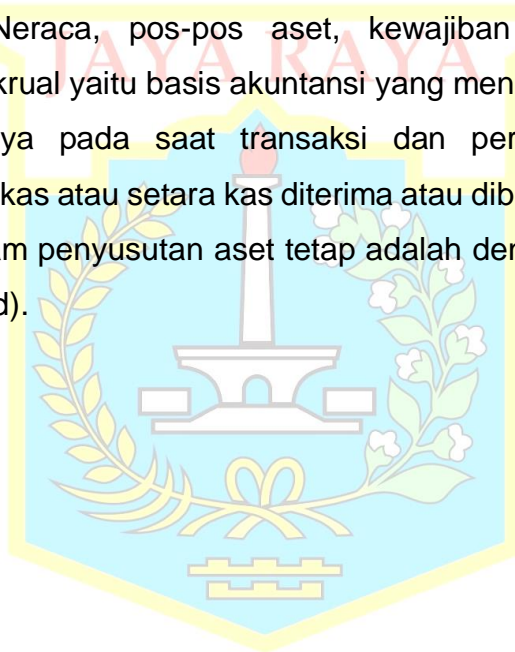
Aset Rusak Berat adalah aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya dikarenakan rusak tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan.

Ekuitas

Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam penyajian Neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Metode penyusutan yang digunakan dalam penyusutan aset tetap adalah dengan metode Garis Lurus (Straight Line Method).



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Penjelasan Per Pos LRA

Belanja

Belanja pada LRA Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Provinsi DKI Jakarta meliputi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1 Realisasi Belanja per 31 Desember 2022

URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Operasi	733.083.313.228,00	707.956.472.249,00
Belanja Pegawai	243.600.157.082,00	235.497.558.531,00
Belanja Barang dan Jasa	489.483.156.146,00	472.458.913.718,00
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	32.590.633.928,00	24.420.478.228,00
Belanja Tanah	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	3.011.679.985,00	2.708.366.217,00
Belanja Gedung dan Bangunan	29.578.953.943,00	21.712.112.011,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-
Belanja Tidak Terduga	-	-
Belanja Tidak Terduga	-	-

- Belanja Operasi Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) sebesar Rp. 707.956.472.249,00 atau 96,57% dari anggaran yang tersedia pada tahun 2022 sebesar Rp. 733.083.313.228,00 diantaranya :
 - Penyerapan Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 235.497.558.531,00 atau 96,67 % dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 243.600.157.082,00 merupakan Belanja tidak langsung seperti pembayaran Gaji Pegawai, Tunjangan Kinerja Daerah Pegawai dan Tunjangan Transport Pejabat.

- Penyerapan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp. 472.458.913.718,00 atau 96,52% dari anggaran senilai Rp. 489.483.156.146,00
- Belanja Modal Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) telah direalisasikan sebesar Rp. 24.420.478.228,00 dari Anggaran sebesar Rp. 32.590.633.928,00 yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.708.366.217,00 serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 21.712.112.011,00

5.1.2 Penjelasan Per Pos Neraca

Aset Lancar.....	Rp. 7.028.929.114,00
Sisa UP.....	Rp. 0,00
Sisa LS	Rp. 0,00
Potongan PFK yang belum disetor.....	Rp. 0,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	Rp. 128.409.276,00
Belanja dibayar dimuka	Rp. 1.095.952.602,00
Nilai persediaan sebesar	Rp. 5.804.567.266,00

- Terdapat Piutang Lain-lain PAD yang sah (Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat) atas temuan Pemeriksaan BPK Nomor 43/LKPD2022/Tim-08/05/2023 Tanggal 3 Mei 2023 sebesar Rp.128.409.276,00
- Terdapat Belanja di bayar dimuka sebesar Rp. 1.095.952.602,00 terdiri atas Belanja Barang dibayar dimuka yaitu Saldo BBM dibayar dimuka Rp. 1.095.952.602,00 yang merupakan sisa belanja BBM per 31 Desember 2022 pada setiap UPD.
- Persediaan akhir tahun di pengurus barang senilai Rp. 5.804.567.266,00 yaitu dari Persediaan Barang Pakai Habis sebesar Rp. 5.804.567.266,00.

Aset Tetap.....Rp. 783.506.105.934,00

Aset Tetap Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 5.257.927.912,00 dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan atas akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 dan koreksi lebih catat aset tetap. Adapun rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut

Tabel 5.2 Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2022

Daftar Aset tetap	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021
Tanah	531.021.041.959,00	533.989.914.639,00
Peralatan dan Mesin	126.072.291.921,00	124.722.825.727,00
Gedung dan Bangunan	559.470.265.412,00	540.828.552.368,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	673.931.525,00	731.054.525,00
Aset Tetap Lainnya	622.712.239,00	663.368.239,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(115.599.977.278,00)	(108.487.698.586,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(318.597.191.610,00)	(302.986.277.359,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(489.558.234,00)	(501.443.707,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(196.262.000,00)	(196.262.000,00)
Jumlah	782.021.591.814,00	788.764.033.846,00

Saldo Aset Tetap dapat dirinci menjadi beberapa akun aset tetap, yaitu :

TanahRp. 531.021.041.959,00

Saldo Aset Tanah mengalami penurunan nilai sebesar Rp. 2.968.872.680 dari aset tanah pada tahun sebelumnya dikarenakan koreksi lebih catat pada tanah Kecamatan Gambir.

Peralatan dan Mesin.....Rp. 126.072.291.921,00

Terdapat penambahan nilai peralatan dan mesin senilai Rp. 1.349.466.194,00 dari Saldo Tahun 2021 yang berasal dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2022, transfer aset dari OPD lain, Reklasifikasi Antar Aset Tetap, Reklasifikasi Aset Rusak Berat menjadi Aset Tetap, Kapitalisasi dari Beban Persediaan, Kapitalisasi dari Beban Barang Tak Habis Pakai, Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai (Selain Belanja Modal Tahun 2022). Mutasi tambah kurang aset peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2021 Rp.124.722.825.727,00

Penambahan saldo per 31 Desember 2022

Belanja Modal	Rp.	2.708.366.217,00
Hutang Pihak Ke-3 (Belanja Modal).....	Rp.	0,00
Transfer Masuk dari OPD Lain.....	Rp.	1.103.336.971,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp.	11.610.600,00
Reklasifikasi Aset Rusak Berat menjadi Aset Tetap	Rp.	152.753.000,00
Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Rp.	25.505.580,00
Kapitalisasi dari Beban Barang Tak Habis Pakai	Rp.	9.546.000,00
Koreksi Kurang catat nilai.....	Rp.	0,00

Jumlah penambahan saldo per 31 Desember 2022.. Rp. 4.011.118.368,00

Pengurangan saldo per 31 Desember 2022

Transfer Keluar ke SKPD Lain.....Rp. 0,00

Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat.....Rp. 2.521.755.880,00

Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal per
31 Desember 2022) ke Beban Barang Tak Habis Pakai.. Rp. 46.268.424,00

Jumlah penurunan saldo per 31 Desember 2022..... Rp. 2.661.652.174,00

Jumlah Aset Peralatan dan Mesin

per 31 Desember 2022..... Rp. 126.072.291.921,00

Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....Rp. 559.470.265.412,00

Terdapat penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp. 18.641.713.044,00 yang berasal dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2022, Hutang Pihak ke 3, Reklasifikasi Antar Aset Tetap dan Penghapusan.

Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi.....Rp. 673.931.525,00

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi mengalami penurunan senilai Rp. 57.123.000 dari aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2021.

Aset Tetap Lainnya.....Rp. 622.712.239,00

Saldo Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan senilai Rp. 40.656.000 dari nilai aset lainnya pada tahun 2021 berasal dari Reklasifikasi antar aset tetap.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....Rp. (434.879.845.122,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 mengalami penambahan senilai Rp. (22.708.163.470) dari nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada tahun 2021.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.....Rp. (115.599.977.278,00)

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 mengalami penambahan senilai Rp.(7.112.278.692) dari nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin pada tahun 2021.

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan...Rp. (318.597.191.610,00)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 mengalami penambahan sebesar Rp. (15.610.914.251) dari nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan pada tahun sebelum nya.

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan IrigasiRp. (489.558.234,00)

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 mengalami penambahan senilai Rp.(11.885.473) dari nilai akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan Irigasi pada tahun sebelum nya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya..... Rp. (196.262.000,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan dari nilai akumulasi penyusutan aset tetap lainnya bangunan pada tahun sebelum nya.

Aset Lainnya.....Rp. 4.270.540.653,00

Aset Lainnya Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) per 31 Desember 2022 mengalami penambahan senilai Rp. 213.921.100 dari nilai aset lainnya pada tahun sebelum nya.

Aset Rusak Berat/Usang.....Rp. 26.170.721.594,00

Saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2022 mengalami penurunan senilai Rp. 282.638.112 dari nilai aset rusak berat/usang pada tahun sebelum nya karena adanya penghapusan aset

Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang.....Rp. (21.900.180.941,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2022 mengalami penurunan senilai Rp. 496.559.212 dari nilai akumulasi penyusutan aset rusak berat/usang pada tahun sebelum nya.

Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan**Status Aset..... Rp. 713.222.828,00**

Saldo Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan dari nilai aset dalam proses penyelesaian majelis penetapan status aset pada tahun sebelumnya.

Terdapat 2 UPD yang tercatat memiliki saldo Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebagai berikut :

No	UPD	Aset MPSA	
1	Kelurahan Duri Pulo	Rp	220.450.828,00
2	Kelurahan Kwitang	Rp	492.772.000,00
	Total Aset MPSA	Rp	713.222.828,00

Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian**Majelis Penetapan Status Aset.....Rp. (713.222.828,00)**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan dari nilai aset dalam proses penyelesaian majelis penetapan status aset pada tahun sebelumnya.

Kewajiban.....Rp. 16.817.749.873,00

Kewajiban Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2022 mengalami pengurangan nilai sebesar Rp. 2.585.809.400,00 terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp. 14.948.265.058,00 , Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.346.392.468,00 serta Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 523.092.347,00.

Ekuitas – LO.....Rp. 46.039.760.741,00

Saldo ekuitas – LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 46.039.760.741,00 didapat dari ekuitas awal - LO sebesar Rp. 779.753.639.774,00 ditambah surplus/ defisit LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp. (732.275.356.257,00), Koreksi Ekuitas sebesar Rp. (1.438.522.776,00) dan Mutasi RK PPKD sebesar Rp. 731.948.065.117,00.

RK PPKD.....Rp. 731.948.065.117,00

5.1.3 Penjelasan Per Pos LO

Laporan Operasional terdiri dari :

- Pendapatan LO

Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 tidak menerima Pendapatan Hibah - LO yang berasal dari Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta sehingga saldo Pendapatan LO sebesar Rp. 0,00.

- Beban Operasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 704.031.043.869,00 dengan rincian :

- Beban Pegawai senilai Rp. 233.011.715.902,00 terjadi kenaikan sebesar 2,61% dari tahun 2021.
- Beban Barang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 46.566.906.168,00 terjadi kenaikan sebesar 107,34% dari tahun 2021.
- Beban Jasa pada Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 408.775.839.535,00 terjadi kenaikan sebesar 6,05% dari tahun 2021.
- Beban Pemeliharaan pada Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) sebesar Rp. 15.621.360.874,00 terjadi kenaikan sebesar 50,06% dari tahun 2021.
- Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp. 55.221.390,00 terjadi penurunan sebesar 56,08% dari tahun 2021.

- Surplus / Defisit LO senilai (Rp. 732.275.356.257,00) dari nilai Pendapatan Rp. 0,00 dikurang dengan total nilai beban Rp. 732.275.356.257,00 sehingga Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) mengalami Defisit sebesar Rp. 732.275.356.257,00.

5.1.4 Penjelasan Umum Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya atau Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

- Nilai Ekuitas Awal pada Ekuitas LO sebesar Rp. 779.753.639.774,00
- Perubahan Ekuitas = Nilai Surplus/Defisit Lo + Mutasi RK/PPKD + Koreksi Ekuitas = Rp. (1.765.813.916,00)
 - Nilai Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (732.275.356.257,00) didapat hasil Surplus/Defisit LO pada Laporan Operasional,
 - Mutasi RK PPKD Rp. 731.948.065.117,00; dan
 - Koreksi Ekuitas Rp. (1.438.522.776,00)
- Nilai Ekuitas Akhir Rp. 777.987.825.858,00
 - Ekuitas LO = Nilai Ekuitas LO awal + Surplus/Defisit Lo + Koreksi Ekuitas = Rp. 46.039.760.741,00
 - RK PPKD = Nilai Mutasi RK PPKD senilai Rp. 731.948.065.117,00.

5.2 Pengungkapan Atas Pos-pos Laporan Keuangan Penerapan Basis Kas Atas Pendapatan Dan Belanja Serta Basis AkruaI Atas Pendapatan Dan Beban

▪ Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2022 menggambarkan realisasi anggaran mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Realisasi pendapatan sebesar Rp.0 karena Kota Administrasi Jakarta Pusat

(Gabungan) tidak memiliki pendapatan.

Realisasi belanja berdasarkan terbitnya SPJ adalah Rp. 732.376.950.477,00 atau 95,65% dari anggaran sebesar Rp. 765.673.947.156,00

Adapun realisasi belanja tersebut terdiri dari :

- belanja pegawai sebesar..... Rp. 235.497.558.531,00
 - belanja barang dan jasa sebesar.....Rp. 472.458.913.718,00
 - belanja modal sebesarRp. 24.420.478.228,00
- Sehingga Surplus / (Defisit) sebesar Rp. (732.376.950.477,00).

▪ **Laporan Operasional**

Laporan Operasional yang berakhir 31 Desember 2022 menggambarkan beban dari realisasi belanja mencakup unsur-unsur pendapatan LO dan Beban Operasi. Realisasi Pendapatan-LO merupakan nilai pendapatan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) sebesar Rp. 0,00 dikurang Beban Operasi.

Adapun Beban Operasi sebesar Rp. 704.031.043.869,00 dengan rincian :

- Beban Pegawai sebesar.....Rp. 233.011.715.902,00
- Beban Barang sebesarRp. 46.566.906.168,00
- Beban Jasa sebesar.....Rp. 408.775.839.535,00
- Beban Pemeliharaan.....Rp. 15.621.360.874,00
- Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/MasyarakatRp. 55.221.390,00,00

Sehingga Surplus / (Defisit) LO didapat dari pendapatan LO dikurang Beban Operasi sehingga sebesar Rp. (732.275.356.257,00)

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NONKEUANGAN

6.1 Domisili

Kota Administrasi Jakarta Pusat beralamatkan di Jl.Tanah Abang 1 No. 1 Jakarta Pusat.

6.2 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
5. Pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
7. Pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
10. Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
11. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;

12. Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
13. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
14. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
15. Pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
16. Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi Jakarta Pusat;
17. Pelaksanaan Kesekretariatan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
18. Fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
19. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
20. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Fungsi tambahan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;

5. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
6. Fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
7. Fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
8. Fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

6.3 Struktur Organisasi

Secara garis besar struktur organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	DHANY SUKMA	WALIKOTA KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
2	IQBAL AKBARUDIN	PLT. WAKIL WALIKOTA KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
3	IQBAL AKBARUDIN	SEKRETARIS KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
4	DANI RAMDANI	ASISTEN PEMERINTAHAN SEKKO ADM. JAKARTA PUSAT
5	BAKWAN FERIZAN G.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKKO ADM. JAKARTA PUSAT
6	M. FAHMI	ASISTEN ADMINISTRASI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKKO ADM. JAKARTA PUSAT
7	ISHRAN PRASETIAWAN	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETKO ADM. JAKARTA PUSAT

8	ANI SURYANI	KEPALA BAGIAN HUKUM SETKO ADM. JAKARTA PUSAT
9	MUNJIR MUNAJI	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK SETKO ADM. JAKARTA PUSAT
10	ISTYA SATI MURNENDIAH	KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETKO ADM. JAKARTA PUSAT
11	MUHAMMAD YASSIN K.P	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETKO ADM. JAKARTA PUSAT
12	RISAN	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETKO ADM. JAKARTA PUSAT
13	MARTUA SITORUS	KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SETKO ADM. JAKARTA PUSAT
14	AHMAD JUHANDI	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETKO ADM. JAKARTA PUSAT



BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan berbasis Akrual yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Dengan rincian Laporan Keuangan berbasis Akrual yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran.

Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Semester II per 31 Desember 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transakai dan kejadian-kejadian penting lainnya. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan berdasarkan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam penyajian Neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.